

LAPORAN ANGGOTA DPRD PASER



**KUNJUNGAN KERJA PANSUS 1 DPRD KABUPATEN
PASER KE KANTOR DPRD PPU DAN DINAS
PANGAN PERTANIAN DAN PANGAN BALIKPAPAN**

15 FEBRUARI 2019

1. HJ.RIDHWATI SURYANA RS
2. H. ABDUL LATIF THAHA, S. AG
3. HERMAN SETIAWAN, SH
4. H. ARBAIN
5. ASPIANA
6. H. AMIRUDDIN, ST
7. H. ABDULLAH, SE
8. HM ROBERT SARAGIH, SE.MM
9. HAMRANSYAH, SH
10. H.ABDUL RAUF HS
11. DODI SATWIKA NASUTION, ST
12. H. HENDRAWAN SAPUTRA, ST
13. SUPIAN
14. M. SALEH, ST
15. ISKANDAR S

KUNJUNGAN KERJA PANSUS 1 DPRD KABUPATEN
PASER KE KANTOR DPRD PPU DAN DINAS PANGAN
PERTANIAN DAN PANGAN BALIKPAPAN

LAPORAN
HASIL KUNJUNGAN KERJA PANSUS I RAPERDA ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PASER KE PENAJAM PASER UTARA DAN
BALIKPAPAN TANGGAL 12 s.d 14 FEBRUARI 2019

A. Dasar

1. Jadwal Badan Musyawarah Bulan Januari : 5 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Bulan Maret Masa Persidangan Ke – I (satu) Tahun Sidang 2019.
2. Surat Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Paser Nomor: 090 / 041 / DPRD Tanggal 11 Februari 2019 ke Kantor DPRD Penajam Paser Utara, Perihal: Kunjungan Kerja Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser.
3. Surat Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Paser Nomor: 090 / 042 / DPRD Tanggal 11 Februari 2019 ke Kantor Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan di Balikpapan, Perihal: Kunjungan Kerja Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser.
4. Surat Tugas Nomor: 900 / 54 / P.J.D / DPRD / I / 2019 Tanggal 11 Februari 2019, untuk Dinas, ke Kantor DPRD Penajam Paser Utara PPU dan ke Kantor Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Balikpapan

B. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas :

1. Maksud dari kunjungan kerja adalah untuk mencari bahan masukan terkait dengan raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Terkait Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Ke kantor DPRD PPU, dan raperda tentang Kelembagaan Petani di Balikpapan.
2. Tujuan dari kunjungan kerja adalah ke Kantor DPRD PPU, dan ke Kantor Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan di Balikpapan .

C. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser yang melaksanakan tugas :

No.	Nama	Jabatan
1	Hj. Ridhawati Suryana RS	Koordinator 1
2	H. Abdul latif thaha, S. Ag	Koordinator 2
3	Herman Setiawan, SH	Ketua Pansus
4	H. Arbain	Wakil Ketua Pansus
5	Aspiana	Sekretaris
6	H. Amiruddin, ST	Bendahara
7	H.Abdullah, SE	Anggota
8	Hamransyah, SH	Anggota
9	H. M Robert saraghi, SE. MM	Anggota
10	Dody Satwika Nasution, ST	Anggota
11	H. Abdul rauf H.S	Anggota
12	H. Hendrawan Putra, ST	Anggota
13	Supian	Anggota
14	M. Saleh, ST	Anggota
15	Iskandar S	Anggota

D. Tanggal berangkat : 12 Februari 2018

E. Tanggal kembali : 14 Februari 2018

F. Hasil Perjalanan Dinas, sebagai berikut:

A. KANTOR DPRD PENAJAM PASER UTARA

Kunjungan Kerja (KUNKER) Pansus 1 Raperda Tentan Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Terkait Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum DPRD Kabupaten Paser ke Kantor DPRD Penajam Paser Utara.

Tana Paser Kunker Pansus 1 Raperda DPRD Paser yang dipimpin oleh Wakil ketua Dprd 1 Hj. Ridhawati Suryana Rs, Wakil Ketua Ketua Dprd 2 H. Abdul latif Thaha, S. Ag, Ketua Pansus 1 Herman Setiawan, Wakil Ketua Pansus Arbain, Sekretaris Pansus Aspian, Bendahara Pansus H.Amiruddin, dan anggota pansus lainnya seperti Hamransyah, h.

dikarnakan peraturan menteri nomor 61 otonomi itu untuk rumah sakit saja dan tetapi yang lainnya tidak dipindahkan pada pelayanan umum daerah," ujar Amiruddin. (Hms/Rrc)

B. KANTOR PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kunjungan Kerja (KUNKER) Pansus 1 Raperda DPRD Kabupaten Paser ke Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan tentang Kelembagaan Petani di Balikpapan

Tana Paser Kunker Pansus 1 Raperda DPRD Paser yang dipimpin oleh Wakil ketua Dprd 1 Hj. Ridhawati Suryana Rs, Wakil Ketua Ketua Dprd 2 H. Abdul latif Thaha, S. Ag. Ketua Pansus 1 Herman Setiawan, Wakil Ketua Pansus 1 H. Arbain, Sekretaris Pansus Aspian, Bendahara Pansus H.Amiruddin, dan anggota pansus lainnya seperti Hamransyah, H. Abdullah, H. M Robert saraghi, Dody Satwika Nasution, H. Hendrawan Putra, supian, M. Saleh, Iskandar S, dan H. Abdul Rauf, yang menghadiri rapat membahas masalah tentang Kelembagaan Petani Bertempat di ruang rapat kantor dinas pertanian dan perikanan di Balikpapan Selasa (12 / 2 / 2019).

Rapat ini dipimpin langsung oleh kepala dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Bapak M.Yusuf selaku narasumber rapat mengatakan untuk masalah perda kelembagaan di kota balikpapan belum ada, Khususnya di kantor dinas pangan pertanian dan perikanan kota balikpapan tersebut dan kami hanya mengikuti Peraturan Mentri atau PERMEN dan undang-undang atau UU. Akan tetapi ada kelembagaan kelompok tani yang sudah terbentuk terutama Lembaga Keuangan Mitra Macro (LKMA).

LKMA di kota balikpapan ada empat yaitu LKMA Mitra Agro Kota balikpapan sendiri, LKMA Karya Harapan Bersma kelurahan Teritip Balikpapan Timur, LKMA Kayu Baimbay di Lamaru, LKMA Tropic Jaya Kelurahan Manggar Baru dan dari keseluruhan kelembagaan ada tiga yang ada di balikpapan timur dan di utara dan yang paling maju LKMA adalah di balikpapan utara karna omset Pendapatany kurang lebih 2.000.000.000.

Tujuan terbentuknya LKMA itu adalah untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar dan juga tumbuhnya imfrastruktur pelayanan yang kuat dan dimiliki masyarakat pedesaan.

Dengan adanya LKMA struktur dari ekonomi pada petani di balikpapan ada peningkatan dikarnakan masyarakat kota balikpapan khususnya petani bisa meminjam uang di LKMA dengan beberapa persyaratan agar mendapat kemudahan untuk tujuan usaha dan tidak sama halnya lembaga keuangan pada Bank.

Perkembangan LKMA di kota Balikpapan sejak tahun 2008 mendapatkan APBD propinsi hibah sebesar 10.000.000 untuk kelompok tani di 10 kelompok tani dan itu diberi sarana simpan pinjam untuk kelompok tani yang merupakan perkembangan tahap awal dari LKMA. Di tahun 2010 mendapatkan lagi dana dari kementrian pertanian 100.000.000 berupa Pengutan Usaha Agro Bisnis pertanian atau PUAB untuk guna mengunjungi Balai Usaha Mandiri Terpadu atau BMT Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) di jogja untuk gabungan kelompok tani. Pada tahun 2012 PUAB mendapatkan bantuan lagi dari kementrian pertanian yaitu 100.000.000 untuk gapoka pertanian bersama dan tropik jaya, 2013 dari anggaran Perubahan Bantuan Dana APBD Balikpapan untuk merehabilitasi gedung layanan LKMA yang ada di karang joang sedangkan 2014 ada pemeliharaan gedung LKMA di teritip, 2015 APBD kota untuk gedung tahapan lanjutan dari tahun 2014, dan 2017 yang terakhir ada anggaran LKMA kayu baimbay di lamaru yaitu pengadaan sofwer keuangan.

Pada tahun 2018 ini LKMA aset sudah mencapai 2.223.000.000 lebih dan juga diberi penghargaan dari LKMA yaitu pada tahun 2013 juara prestasi tingkat nasional dan juara 2 tingkat propinsi dan yang terakhir juara terbaik di tingkat nasional. Tana Paser.

Abdullah, H. M Robert saraghi, Dody Satwika Nasution, H. Hendrawan Putra, supian, M. Saleh, Iskandar S, dan H. Abdul Rauf, yang menghadiri rapat membahas masalah tentang pencabutan Perda no 8 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot, Bertempat di ruang rapat kantor DPRD Penajam Paser Utara di PPU Selasa (12 / 2 / 2019).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD PPU Bapak H. Nanang Ali, SE dan Juga dihadiri oleh pihak rumah sakit penajam paser utara bapak Dr. H. Lukasiwah Es selaku narasumber rapat mengatakan tentang perda retribusi pelayanan no 8 tahun 2005 kami anggap perda retribusi pelayanan rumah sakit tidak layak lagi baik dari segi sisi yunit cost yaitu besaran nilainya dan baik dari segi sisi dari jumlah pelayanan yang ada.

Sehingga kami membuat kesimpulan dari pihak rumah sakit di PPU tidak diperlukan lagi perda retribusi pelayanan nomor 8 tahun 2005 dan yang ada justru dari pihak rumah sakit membuat perda baru yaitu bunyinya Tarif Pelayanan rumah sakit di PPU Nomor 6 Tahun 2018 namun pada saat itu tidak mudah untuk membuat perda baru yang kami buat dari pihak rumah sakit PPU.

Pada tahun 2017 kami membuat peraturan bupati atau di sebut Perda mengganti perda dulu untuk sementara sebelum perda baru terbit di tahun 2018 tentang tarif pelayanan rumah sakit nomor 6 tahun 2018, Untuk mencabut perda tahun 2009.

Kenapa alasannya tidak ada lagi layanan retribusi di karnakan sebagian rumah sakit pada umumnya di indonesia sudah menganut keuangan BLU sehingga pendapatan rumah sakit bukan sebagai obyek pendapatan pemerintah daerah, sehingga itu menjadi dasar kenapa tidak ada lagi tarif pelayanan retribusi lagi dan berubah menjadi tarif pelayanan rumah sakit.

" Berarti Orientasi Badan Layanan Umum (BLU) bukan sebagai obyek pemerintah daerah lagi, Dan BLU bukan lembaga propit erientip Profit oriented adalah keadaan yang berorientasi menguntungkan, Sehingga yang berlabel profit oriented disebut berorientasi kepada keuntungan, yaitu segala perilaku yang dilakukan rumah sakit baik proses produksi dan segala kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut hanya semata untuk memperoleh keuntungan karna kalo tarif itu pembahasannya penuh berada pada rumah sakit dan bukan pemerintah daerah," Kata Hamransyah.

"Peraturan menteri ini melibatkan layanan umum daerah dan tidak perlu memakai retribusi perda dan memakai tarif pelayanan dan juga pada intinya tidak semua perda di cabut

A. PENUTUP

Agar kiranya laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Tana Paser, 15 Pebruari 2019

**ANGGOTA PANSUS I RAPERDA DPRD KAB. PASER YANG
MELAKSANAKAN TUGAS :**

1. HJ. RIDHAWATI SURYANA RS

1.....

2. H. ABDUL LATIF THAHA,S.Ag

2.....

3. HERMAN SETIAWAN, SH

3.....

4. HJ. ASPIANA

4.....

5. H. ARBAIN

5.....

6. H. AMIRUDDIN, ST

6.....

7. HM. ROBERT SARAGIH, SE.,MM

7.....

8. DODY SATWIKI NASUTION, ST

8.....

9. H.ABDULLAH,SE

9.....

10. H. HENDRAWAN PUTRA, ST

10.....

11. SUPIAN

11.....

12. M. SALEH, ST

12.....

13. HAMRANSYAH, SH

13.....

14. ISKANDAR S

14.....

15. H. ABDUL RAUF HS

15.....

**MEMBAHAS PENCABUTAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2005 TERKAIT
RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH SAKIT RSUD KABUPATEN PASER DI
KANTOR DPRD PPU**



**MEMBAHAS TERKAIT KELEMBAGAAN PETANI KABUPATEN PASER DI
KANTOR DINSA PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DI
BALIKPAPAN**

